Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKJIP)

KECAMATAN DLANGGU

Tahun 2025

Contact (0321) 510176
Email : dlanggu@mojoketokab.go.id
Jl. Jendral Ahmad Yani No.9, Dlanggu,
Kec. Dlanggu, Mojokerto, Jawa Timur 61371

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Dlanggu Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Dlanggu Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2021 – 2026, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juli 2026

CAMAT DLANGGU

MASLUCHMAN,SH,.M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 196911191998031005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan total 1 indikator kinerja dan 7 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 4 sasaran strategis dan dengan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	92,5	93,16	100,71%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	83,63	100,75%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97	93,38	96,26%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	81	79,04	97,58
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	3 Inovasi	100%

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2025	Capaian
1.	Menigkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92,5	93,16	100,71%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjng Kinerja Perangat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Dlanggu	83	83,63	100,75%
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%
4.	Teruvujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Kinerja keuangan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 2.464.797.308,00 atau 93,38% dari total pagu anggaran sebesar Rp 2.639.646.450,00.

Capaian kinerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudan harapan tersebut.

Daftar Isi

Halaman Judul i
Ikhtisar Eksekutif ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel v

BAB I PENDAHULUAN 8

I.1 Latar Belakang 8
I.2 Gambaran Umum 8
I.3 Isu-isu Strategis 9
I.4 Sistematika Penulisan 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 20

II.1 Penjenjangan Strategis 20
II.2 Indikator Kinerja Utama 20
II.3 Perjanjian Kinerja 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31

III.1 Pengukuran Kinerja 31
III.2 Analisis Kinerja 31
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya 33
III.4 Akuntabilias Anggaran 43

BAB IV PENUTUP 48

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Data Desa Kecamatan Dlanggu…….	3
Tabel 1.2	Data pegawai Kecamatan Dlanggu Tahun 2025…….	5
Tabel II.1	Matrik Penjenjangan Strategis…….....	11
Tabel II.2	Indikator Kinerja Utama…….....	13
Tabel II.3	Perjanjian Kierja Tahun 2025…….....	14
Tabel II.4	Anggaran Per Program…….....	15
Tabel III.1.a	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)……..	16
Tabel III.1.b	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)…….	17
Tabel III.2	Perbandingan Realisasi Kinerja (Perjanjian Kinerja Tahun 2025)	20
Tabel III.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten ……	24
Tabel III.4	Realisasi Anggaran Tahun 2025……..	25
Tabel III.5	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran……	25

Daftar Gambar

Gambar I.1	Peta Kecamatan Dlanggu…….	2
Bagan I.1	Struktur Organisasi Kecamatan Dlanggu……..	4
Gambar III.1	Grafik perbandingan Nilai IKM kecamatan Dlanggu……	23

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dlanggu Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Kecamatan Dlanggu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diwajibkan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Kecamatan Dlanggu berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan umum, mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakatan, ketentaraman umum penegakan peraturan daerah dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati Mojopahit Mojopahit Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

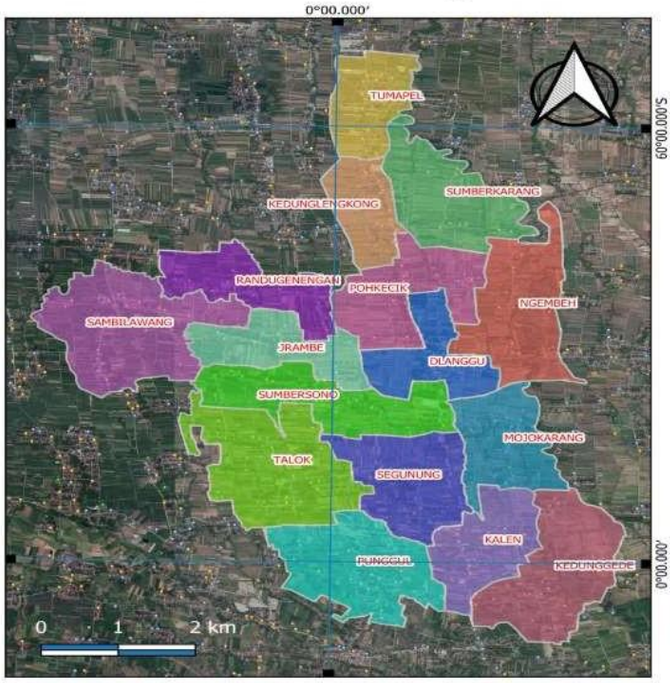
Penyampaian LKjIP Kecamatan Dlanggu tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kecamatan Dlanggu yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Reviu Renstra Kecamatan Kecamatan Dlanggu Tahun 2021-2026, khususnya Perjanjian Kinerja tahun 2025. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Dlanggu di masa yang akan datang.

I.2 Gambaran Umum

Kecamatan Dlanggu terdiri dari 16 Desa dan 80 dusun berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 35,39 km2 dan jumlah penduduk 58.439 orang (L = 29.487, P = 28.952). Adapun batas – batas wilayah Kecamatan Dlanggu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bangsal
- Sebelah Timur : Kecamatan Kutorejo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gondang
- Sebelah Barat : Kecamatan Dlanggu dan Kec. Jatirejo

Peta Kecamatan Dlanggu



Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Dlanggu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan olehperangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara administratif kecamatan Dlanggu terdiri dari 16 desa dan 80 dusun dengan jumlah RW sebanyak 100 dan RT sejumlah 297 serta jumlah penduduk sebanyak 58.439 jiwa dan potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Dlanggu denga rincian sebagai berikut :

I.2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dlanggu

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, dapat dijabarkan bahwa Kecamatan Dlanggu di bentuk guna meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Selain itu tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

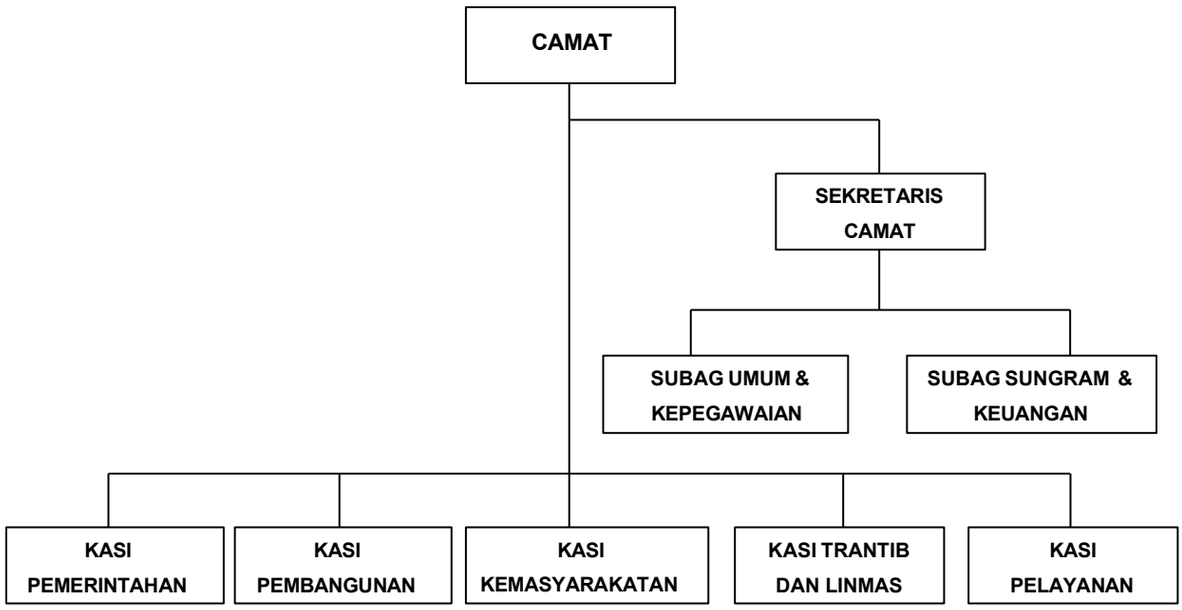
Struktur Organisasi Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

Bagan I.1

STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO



Sumber data, Perbup nomor 80 tahun 2016

I.2.2 Sumber Daya Kecamatan Dlanggu

Sumber daya pada Kecamatan Dlanggu yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan Kecamatan Dlanggu terdiri dari sumber daya manusia dan fasilitas serta aset penunjang. Kecamatan Dlanggu didukung oleh 17 orang ASN dan 6 orang Non-ASN, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Kecamatan Dlanggu dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) pada tahun 2025 – 2029 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.2
Data pegawai Kecamatan Dlanggu Tahun 2025

No.	Kategori	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Jumlah Pegawai PNS	9	5	14
2	Jumlah Pegawai PPPK	0	1	1
3	Jumlah Pegawai THL	3	1	4

4	Tingkat Pendidikan			
	1. S2	2	1	3
	2. S1	5	5	10
	3. D3/D4	0	0	0
	4. SLTA	5	1	6
5	Golongan PNS			
	1. Gol IV	2	0	2
	2. Gol III	5	6	11
	3. Gol II	1	0	1
6	Menurut Jabatan			
	1. Eselon II	0	0	0
	2. Eselon III	2	0	2
	3. Eselon IV	3	3	6
	4. Fungsional	0	0	0
	5. Pelaksana	5	2	7
7	Agama			
	1. Islam	12	7	19
	2. Non Islam	0	0	0

Sumber data Kecamatan Dlanggu 2025

Dari jumlah 19 personil tersebut 32 % berpendidikan SLTA/MA/ Sederajat, 0 % berpendidikan D3/D4, 53 % berpendidikan Sarjana, dan 16 % tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Dlanggu sudah sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Dlanggu terdiri dari: Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Dlanggu Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Jalan Jenderal A. Yani nomor 09, meliputi Gedung Kantor Kecamatan, Pendopo Kecamatan, Mobil Dinas, Sepeda Motor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya.

I.3 Isu-isu Strategis

Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Dlanggu diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

a. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatandan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh managemen Kecamatan Dlanggu.

Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Dlanggu.
2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.
3. Adanya Infrastruktur kecamatan seperti gedung kantor lantai 3 yang memadai
4. Adanya sinergitas dan sistem koordinasi intern yang baik

Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersedian jumlah aparatur kecamatan
2. Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai tupoksi
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik ditingkat kecamatan maupun desa sehingga perlubanyak dilakukan pelatihan dan pembinaan.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh managemen Kecamatan Dlanggu dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

- Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Dlanggu termasuk daerah wisata, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatanpariwisata.
2. Adanya perbaikan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat serta dapat menarik investor untuk menanamkan investasinya ke Wilayah Kecamatan Dlanggu;
3. Keadaan masyarakat yang kondusif berpengaruh terhadap pelaksanaan

pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

- Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan
2. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi lingkungan.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
5. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang;
6. Kurangnya pengetahuan Masyarakat dalam pengetahuan di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan Masyarakat maka perlu diadakan kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan masyarakat seperti Kegiatan Penurunan Stunting , Forum Anak , Karang Taruna , PKK dll.
7. Banyak format pelayanan yang berbeda tiap kecamatan;
8. Kurangnya pemahaman Kepala Desa beserta perangkat desa tentang teknis dan pentingnya Pembakuan Nama Rupabumi;
9. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa;
10. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa antar kecamatan;
11. Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang tata cara kerja sama antar daerah dan pihak ketiga.

.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LKjIP Kecamatan Dlanggu Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2021-2025 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

"Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Kecamatan dengan tugas utama "membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif" mendukung pencapaian misi ke-3:

"Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang beritegritas, akuntabel, bersih, transparan"

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1.a Matriks Penjenjangan Strategis

(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	**IKM Kecamatan**	**90,55**
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	**IKM Kecamatan**	**90,55**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**82,75 (A)**
	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	**3 Inovasi**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi**	**100%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**	**96%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan**	**100%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	3 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan**	**100,00%**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**100%**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	10 Unit
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			**Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan**	**100%**
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan**	**1537 pelayanan**
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti**	**100%**
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**14 Fasilitasi**
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen

				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2025-2029 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Kecamatan Dlanggu dengan tugas utama “meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa”, mendukung pencapaian misi ke-1:

“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik”

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya :

Tabel II.1.b Matriks Penjenjangan Strategis
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Meningkatya Kualitas Pelayanan Publik		
Meningkatnya Kinerja Layanan Masyarakat	**IKM Kecamatan**	**92,5**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretriatan**	**85%**
	Persentase Realisasi Anggaran PD	**97%**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%**	**90%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti**	**80%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Indeks Profesionalitas ASN PD**	**81 (Tnggi)**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar**	**92%**
	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	**92%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	3 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan**	**100 %**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar**	**85%**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	10 Unit
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			**Persentase Layanan yang Diselenggarakan Sesuai Standar**	**100%**
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti**	**100%**
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti**	**100,00%**
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Jumlah Laporan Koordinasi**	**15 Fasilitasi**
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen

II.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Kecamatan Dlanggu memiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut :

Tabel II.2.a. Indikator Kinerja Utama
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2026)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	Indeks	IKM Kecamatan Ket: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00 Total dari Nilai Persepsi per Unsur ---------- x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi	Laporan Hasil Sukma-E

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		Persen	Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan ----------100% keseluruhan Jumlah Pelayanan	Laporan Hasil Pelayanan
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti		Persen	Jumlah koordinasi yang ditndaklanjuti ---------- x 100% keseluruhan Jumlah Koordinasi	Laporan Hasil Koordinasi
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. ket Nlai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	LHE SAKIP
		3.2	Persentase Realisasi Anggran Perangkat Daerah	persen	Jumlah Realisasi Anggaran ---------- x 100% Jumlah Pagu Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan

		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	IP ASN Kecamatan Ket: Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		laporan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Laporan Inovasi Kecamatan

Tabel II.2.b. Indikator Kinerja Utama
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Menigkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Indeks	IKM Kecamatan Ket: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00 Total dari Nilai Persepsi per Unsur ---------- x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi	Laporan Hasil Sukma-E

2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjng Kinerja Perangat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Dlanggu	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. ket Nlai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	Persen	Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan ---------- x 100% keseluruhan Jumlah Pelayanan	Laporan Hasil Pelayanan
4.	Teruvujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah koordinasi yang ditndaklanjuti ---------- x 100% keseluruhan Jumlah Koordinasi	Laporan Hasil Koordinasi

II.3 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
b. Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);

c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kecamatan Dlanggu Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut:

Tabel II.3.a Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	92,5

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti		100%
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat daerah	83(A)
		3.2	Persentase Realisasi Anggran Perangkat Daerah	97%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	79,04
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 2.222.076.000	APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 13.900.0000	APBD 2025
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.403.670.450	APBD 2025

Tabel II.3.b. Perjanjian Kinerja PerubahanTahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Menigkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92,5	93,16	100,71%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjng Kinerja Perangat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Dlanggu	83	83,63	100,75%
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%
Teruvujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja perubahan, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 2.222.076.000	P-APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 13.900.0000	P-APBD 2025
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.403.670.450	P-APBD 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Kecamatan Dlanggu tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran strategis. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan Sekretariat Daerah Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terrealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 sbb :

Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Terwujudnya pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	92,5	93,16	100,71%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu :

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	100%	100%
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil oordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83(A)	83,63 (A)	100,75%

	Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.2	Persentase Realisasi Anggran Perangkat Daerah	97,00%	93,38%	96,26
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)	79,04 (Rendah)	97,58
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	3 Inovasi	100%

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi 2025	Capaian
				I	II	III	IV		
1.	Menigkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92,5	-	93,14	-	93,18	93,16	100,71%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjng Kinerja Perangat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Dlanggu	83	-	-	83,63	-	83,63	100,75%
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	18%	30%	27%	28%	100%	100%
4.	Teruvujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	25%	-	35%	40%	100%	100%

III.2 Analisis Kinerja

Di tahun 2025, Kecamatan Kecamatan Dlanggu memiliki 2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja dan 4 kinerja lainnya dengan 6 indikator kinerja.

Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu : “Terwujudnya pelayanan Publik yang Optimal” sasaran tersebut memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya yaitu “IKM Kecamatan”, IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, dengan formulasi perhitungannya :

$$\frac{\textit{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\textit{Total Unsur yang Terisi}} \textit{ x Nilai Penimbang}$$

Kinerja Lainnya “Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya yaitu Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan formulasi perhitungannya :

$$\frac{\textit{Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan}}{\textit{Jumlah pelayanan yang terlayani}} \textit{ x 100\%}$$

Kinerja Lainnya “Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya yaitu Persentase hasil oordinasi yang ditindaklanjuti dengan formulasi perhitungannya :

$$\frac{\textit{Jumlah dokumen hasil koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\textit{Jumlah dokumen hasil koordinasi}} \textit{ x 100\%}$$

Kinerja lainnya Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel memiliki 3 indikator untuk mengukur kinerjanya yaitu :

1. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari LHE SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP, adapun kategori nilai :

Kategori Sangat Kurang : 0 – 30

Kategori Kurang : 30 – 50

Kategori Cukup : 50 – 60

Kategori Baik : 60 -70

Kategori Sangat Baik : 70 – 80

Kategori Memuaskan : 80 -90

Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100

2. Indikator Persentase Realisasi Anggran perangkat daerah, dengan formulasi perhitungannya :

Jumlah Realisasi Anggaran
---------- x 100%
Jumlah Pagu Anggaran

3. Indikator Indeks Profesionalitas ASN, nilai Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dari hasil Evaluasi BKPSDM, adapun kategori nilai IP ASN :

Kategori Sangat Rendah : =< 60

Kategori Rendah : 61 – 70

Kategori Sedang : 71 – 80

Kategori Tinggi : 81 – 90

Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100

Kinerja Lainnya "Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah" memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya yaitu Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan formulasi perhitungannya adalah : ***Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan***

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Kecamatan Dlanggu ada 4 Sasaran Strategis, sasaran pertama yaitu "Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan" Sasaran tersebut memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya, yaitu "IKM Kecamatan", dengan formulasi perhitungannya :

Total dari Nilai Persepsi per Unsur
---------- x Nilai Penimbang
Total Unsur yang Terisi

Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Kinerja Perangat Daerah memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya, yaitu "Nilai

SAKIP Kecamatan Kecamatan Dlanggu" adapun nilai SAKIP tersebut diperoleh dari LHE SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP, adapun kategori nilai :

Kategori Sangat Kurang : 0 – 30
Kategori Kurang : 30 – 50
Kategori Cukup : 50 – 60
Kategori Baik : 60 -70
Kategori Sangat Baik : 70 – 80
Kategori Memuaskan : 80 -90
Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100

Sasaran Strategis ketiga yaitu Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan) memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar" dengan formulasi perhitungan :

Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
---------- x 100%
Jumlah pelayanan yang terlayani

Sasaran Strategis keempat yaitu Teruvujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti" dengan formulasi perhitungan :

Jumlah dokumen hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
---------- x 100%
Jumlah dokumen hasil koordinasi

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.2.a Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
(Sesuai dengan Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi					Target Akhir Renstra	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	88	94	90,55	92,13	93,16	93	100,71%

Capaian indikator "IKM Kecamatan" pada sasaran strategis Tewujudnya pelayanan publik yang optimal di tahun 2025 adalah sebesar 93,16% angka capaian tersebut didapatkan dari rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 1 yakni sebesar 93,14 dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 2 yakni sebesar 93,18. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

a. Kualitas pelayanan yang baik, meliputi waktu, prosedur serta persyaratan yang tidak berbelit;
b. Sumber daya manusia yang profesional dan ramah;
c. Sarana dan prasarana yang cukup memadai , terdiri dari ruang tunggu yang nyaman, fasilitas yang ramah disabilitas serta system antrian yang tertib;
d. Transparansi serta kepastian layanan.

Selain sasaran di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025) juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	Realisasi					Target Akhir Renstra	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Perangkat daerah	79,66 (BB)	81,01 (A)	82,71 (A)	82,85 (A)	83,63 (A)	83	100,75%
		3.2 Persentase Realisasi Anggran Perangkat Daerah	73,25%	94,13%	97,29%	96,65%	93,38%	97%	96,26%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	-	85	85,32	75,12	79,04	81	97,58%
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	NA	3 Inovasi	3 Inovasi	3 Inovasi	3 Inovasi	3 Inovasi	100%

1. Capaian indikator “Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” pada sasaran strategis Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari akumulasi laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Keberhasilan capaian target tersebut

dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

a. SOP yang terdokumentasi dan mudah dipahami;
b. Adanya Budaya kerja yang responsif dan ramah;
c. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelayanan;
d. Adanya laman pengaduan yang mudah diakses oleh warga.

2. Capaian indikator “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti” pada sasaran strategis Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen hasil koordinasi yang telah di tindaklanjuti ditahun berjalan. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

a. Adanya penanggungjawab untuk menindaklanjuti setiap koordinasi;
b. Tidak saling lempar tanggung jawab antar bidang/bagian;
c. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala.

3. Capaian indikator “Nilai Sakip Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 83,63. Angka capaian tersebut didapatkan dari nilai yang ada pada dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun berjalan. Penilaian AKIP tersebut meliputi penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

a. Adanya dokumen perencanaan kinerja yang terukur dan relevan;
b. Tim SAKIP memahami regulasi dan teknis penyusunan;
c. Adanya Program/kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indikator;
d. Data capaian indikator valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
e. Tertib Administrasi dan Dokumentasi.

4. Capaian indikator “Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 93,38%. Angka capaian tersebut didapatkan dari perbandingan capaian anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran. Keberhasilan capaian target tersebut

dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

a. Perencanaan anggaran yang matang;
b. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan;
c. Adanya Evaluasi realisasi yang dilakukan secara berkala;
d. Koordinasi yang baik antar PPTK, bendahara, dan PA;
e. Kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan.

5. Capaian indikator “Indeks Profesionalitas ASN” pada sasaran strategis Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 85. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen Nilai IP ASN. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
   a. Adanya penilaian kinerja yang Objektif;
   b. Adanya Komitmen Pimpinan dalam Pembinaan ASN;
   c. Penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan;

6. Capaian indikator “Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi sertaberkelanjutan” pada sasaran strategis Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah di tahun 2025 adalah sebesar 3 inovasi. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen laporan inovasi. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
   a. Adanya penyebarluasan inovasi kepada ASN dan masyarakat;
   b. Adanya dukungan sumber daya terutama Sarana dan prasarana mendukung;
   c. Dilakukan perbaikan dan penyempurnaan;
   d. Dokumentasi dan Legalitas yang kuat pada setiap inovasi.

Tabel III.2.b

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

(Sesuai dengen Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

NO.	Sasaran Program	Indikator program	Target	Realisasi					Target Akhir Renstra	Progres Capaian Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 (A)	79,66 (A)	81,01 (A)	82,71 (A)	82,85 (A)	83,63 (A)	83 (A)	100,75 %
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	NA	3 Inovasi	3 Inovasi	3 Inovasi	3 Inovasi	3 Inovasi	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Capaian indikator “IKM Kecamatan” pada sasaran strategis Tewujudnya pelayanan publik yang optimal di tahun 2025 adalah sebesar 93,16% angka capaian tersebut didapatkan dari rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 1 yakni sebesar 93,14 dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 2 yakni sebesar 93,18. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:
   a. Kualitas pelayanan yang baik , meliputi waktu, prosedur serta persyaratan yang tidak berbelit;
   b. Sumber daya manusia yang profesional dan ramah;
   b. Sarana dan prasarana yang cukup memadai , terdiri dari ruang tunggu yang nyaman, fasilitas yang ramah disabilitas serta system antrian yang tertib;
   c. Transparansi serta kepastian layanan.

2. Capaian indikator “Nilai Sakip Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 83,63. Angka capaian tersebut

didapatkan dari nilai yang ada pada dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun berjalan. Penilaian AKIP tersebut meliputi penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

a. Adanya dokumen perencanaan kinerja yang terukur dan relevan;
b. Tim SAKIP memahami regulasi dan teknis penyusunan;
c. Adanya Program/kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indikator;
d. Data capaian indikator valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
e. Tertib Administrasi dan Dokumentasi.

3. Capaian indikator “Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” pada sasaran strategis Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari akumulasi laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

   a. SOP yang terdokumentasi dan mudah dipahami;
   b. Adanya Budaya kerja yang responsif dan ramah;
   c. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelayanan;
   d. Adanya laman pengaduan yang mudah diakses oleh warga.

4. Capaian indikator “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti” pada sasaran strategis Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen hasil koordinasi yang telah di tindaklanjuti ditahun berjalan. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

   a. Adanya penanggungjawab untuk menindaklanjuti setiap koordinasi;
   b. Tidak saling lempar tanggung jawab antar bidang/bagian;
   c. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala.

Tabel III.2.b Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 s/d 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi		Capaian 2025	Target Akhir Renstra	Progres Capaian Renstra
				2024	2025			
1	Menigkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92,05	92,13	93,16	101,09%	93	100,17%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	83 (A)	82,85 (A)	83,63 (A)	100,75%	82,5 (A)	101,36%
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	Sasaran Program	Indikator program	Target 2025	Realisasi		Capaian 2025	Target Akhir Renstra	Progres Capaian Renstra
				2024	2025			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	92,05	NA	93,16	105,88%	93	101,09%
		Persentase Realisasi Anggaran	97%	96,65%	93,38%	96,26%	95,60%	99,49%
2	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Gambaran capaian kineja tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pada sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan” dengan indikator kinerja IKM kecamatan, tercapai sebesar 93,16 dengan target sebesar 92,05 Kinerja ini tercapai sebesar 101,09% meskipun tidak mencapai target namun Nilai IKM Kecamatan Dlanggu termasuk kategori sangat baik.

   Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh adanya peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi pegawai, peningkatan sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan jika capaian tahun 2025 ini dibandingkan dengan pencapaian akhir tahun renstra sebesar 93 sudah tercapai 100,17.

b. Pada sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah” dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan, tercapai sebesar 83,63 dari target 83,00. Kinerja ini tercapai sebesar 101% dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh adanya peningkatan kompetensi pegawai, peningkatan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi informasi serta pendampingan-pendampingan dari tim SAKIP pemerintah daerah dalam pemenuhan nilai SAKIP. Capaian Nilai SAKIP Kecamatan tahun 2025 lebih baik dibandingkan tahun 2024 sebesar 82,85. Sedangkan jika capaian tahun 2025 ini dibandingkan dengan pencapaian akhir tahun renstra sebesar 87,50 maka nampak adanya pencapaian yang sudah tercapai sebesar 97,19%
c. Pada sasaran strategis / sasaran program “Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)” dengan Indikator Kinerja Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar, tercapai sebesar 100% dengan target sebesar 100%. Kinerja ini tercapai sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh adanya peningkatan kompetensi pegawai dibidang pelayanan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Capaian pada tahun 2025 sama seperti capaian tahun 2024 sebesar 100%. Sedangkan jika capaian tahun 2025 ini

dibandingkan dengan pencapaian akhir tahun renstra sebesar 100%, maka nampak adanya pencapaian yang sudah maksimal.

d. Pada sasaran strategis / sasaran program “Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah” dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti, tercapai sebesar 100% dengan target sebesar 100%. Kinerja ini tercapai sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh adanya sarana prasarana dan sumber daya yang mendukung. Capaian pada tahun 2025 sama seperti capaian tahun 2024 sebesar 100%. Sedangkan jika capaian tahun 2025 ini dibandingkan dengan pencapaian akhir tahun renstra sebesar 100%, maka nampak adanya pencapaian yang sudah maksimal.
e. Pada sasaran Program Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan dengan Indikator kinerja Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan tercapai 90% dari target sebesar 85% atau tercapai sebesar 105,88%, Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh adanya peningkatan kompetensi pegawai, peningkatan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, Sedangkan jika capaian tahun 2025 ini dibandingkan dengan pencapaian akhir tahun renstra sebesar 87,50 tercapai 102,86%, maka nampak adanya pencapaian yang sudah maksimal.
f. Pada Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan dengan Indikator kineja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, pada tahun 2025 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tercapai sebesar 93,38% dari target 97%. Kinerja ini tercapai sebesar 96,26% dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh adanya pemanfaatan teknologi informasi serta pendampingan-pendampingan dari pemerintah daerah dalam pemenuhan realisasi anggaran. Capaian persentase realisasi anggaran tahun 2025 lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 96,65%. Sedangkan jika capaian tahun 2025 ini dibandingkan dengan pencapaian akhir tahun renstra sebesar 95,60%, maka tercapai sebesar 99,49%.

III.3. Prestasi Kinerja Lainnya

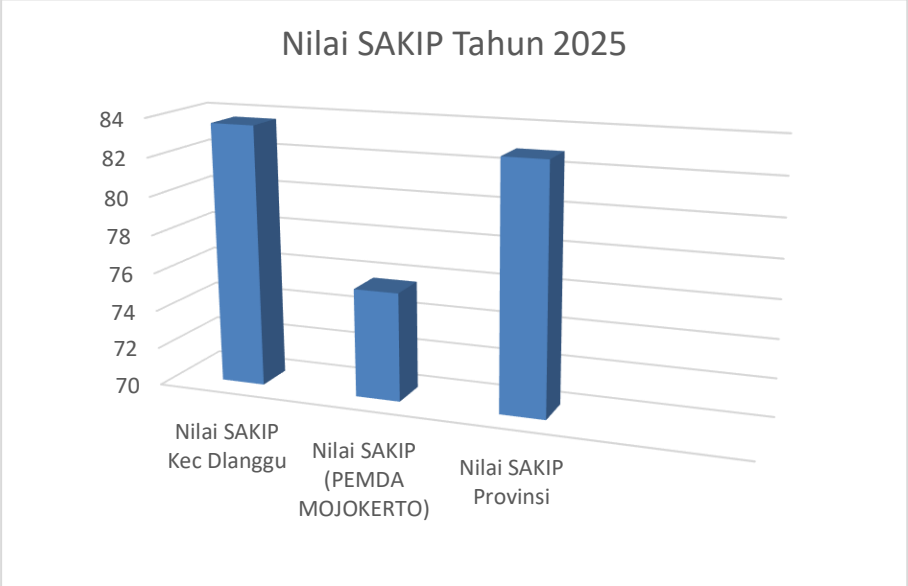
Dengan bantuan aplikasi-aplikasi yang ada di Kabupaten Mojokerto, akuntabilitas kinerja di Kabupaten Mojokerto, khususnya Kecamatan Dlanggu, lebih sistematis, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan nilai IKM Kecamatan Dlanggu yang

mendapatkan predikat Sangat Baik dengan nilai sebesar 93,16 nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Mojokerto dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Kecamatan Dlanggu		Pemda Mojokerto		Provinsi	
		Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Indikator Kinerja	Realisasi 2025
1	Menigkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	93,16	Angka IKM	90,87	IKM Provinsi-	89,71-
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjng Kinerja Perangat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,63	Nilai SAKIP	75,67	Nilai SAKIP Provinsi-	-82,85
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	-	-	-	-
4	Teruvujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-

Gambar 0.1 Grafik Perbandingan Nilai SAKIP Kecamatan Dlanggu



Gambar 0.2 Grafik Perbandingan Nilai IKM Kecamatan Dlanggu



III.4 Akuntabilias Anggaran

Anggaran Kecamatan Dlanggu tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.639.646.450,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 2.464.797.308,00 atau sebesar 93,38% dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	13.900.000,00	13.270.000,00	98,00
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	403.670.450,00	377.785.000,00	93,58
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.222.076.000,00	2.073.742.308,00	93,32

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Menigkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92,5	93,16	100,71%	Rp 2.639.646.450	Rp 2.464.797.308	93,38%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjng Kinerja Perangat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Dlanggu	83	83,63	100,75%	Rp 2.222.076.000	Rp 2.073.742.308	93,32%

3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100,00%	Rp 13.900.000	Rp 13.270.000	98,00%
4	Teruvujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%	Rp 403.670.450	Rp 377.785.000	93,58%
			Rata-rata capaian		100,36%	Total capaian		93,38

Dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 93,38%.

Berdasarkan Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja, realisasi Kecamatan Dlanggu terus mengalami peningkatkan dan dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Dlanggu Tahun 2025-2029, progres capaian Kecamatan Dlanggu telah mencapai 100%. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan kinerja pada Kecamatan Dlanggu. Selain melakukan upaya untuk peningkatan kinerja, Kecamatan Dlanggu juga melakukan efisiensi sumber daya untuk mendukung *refocusing* prioritas pembangunan, efisiensi tersebut berupa:

1. penghematan listrik dan air dengan mematikan komputer/AC/lampu/dll saat tidak digunakan;
2. Efisiensi Belanja Barang.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kecamatan Dlanggu, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis beserta indikator kinerja organisasi. LKjIP Kecamatan Kecamatan Dlanggu merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Kecamatan Dlanggu pada tahun 2025.

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Kecamatan Dlanggu pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun ke-5 (Lima) dari Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Dlanggu Tahun 2021-2026 dan tahun ke-2 (dua) dari Reviu Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Dlanggu Tahun 2021-2026. Adapun Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Kecamatan Kecamatan Dlanggu tahun 2025 dapat disimpulkan hasil capaian Renstra 2021-2026 yaitu sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 93,38% .Realisasi anggaran serta efisiensi tersebut juga meliputi pencapaian sasaran kinerja lainnya yang ditugaskan/amanatkan kepada Kecamatan Kecamatan Dlanggu pada tahun 2025 oleh Bupati Mojokerto.

Adapun keberhasilan tersebut dapat dicapai karena faktor-faktor pendorong sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dana untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kecamatan Dlanggu;

2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas;
3. Sarana dan prasarana kerja yang memadai.

B. Langkah Perbaikan di masa mendatang

Sebagai langkah strategis untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang, Kecamatan Dlanggu akan melakukan beberapa perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas ASN :
   Melalui pelatihan, bimtek, serta pengembangan kompetensi berbasis tugas dan fungsi agar profesionalitas aparatur semakin meningkat.
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola :
   Penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi agar lebih efektif, efisien, dan transparan.
3. Penguatan Inovasi Layanan Publik :
   Mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor :
   Meningkatkan komunikasi dan sinergi antar desa, OPD, dan mitra pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan lintas bidang.
5. Pemantapan Tata Kelola Arsip dan Administrasi :
   Guna menjawab kelemahan dalam sistem kearsipan dan pemahaman tupoksi, akan dilakukan standarisasi SOP serta sosialisasi internal secara berkala.

Selain upaya perbaikan kinerja diatas Kecamatan Dlanggu juga memanfaatkan hasil rekomendasi SAKIP sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola kinerja tindak lanjut yang dilakukan meliputi:

1. Kecamatan Dlanggu akan menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku.
2. Pengukuran Kinerja di Kecamatan Dlanggu telah dilakukan hingga level individu pegawai.
3. Kecamatan Dlanggu telah melengkapi laporan kinerja dengan analisis
4. terhadap perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Provinsi.

5. Laporan kinerja telah dilengkapi dengan analisis mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efisiensi pencapaian kinerja.
6. Laporan Kinerja Kecamatan Dlanggu telah dilengkapi dengan analisa kegagalan pada sub kegiatan yang belum mencapai target
7. Laporan Kinerja Kecamatan Dlanggu telah membuat uraian pemanfaatan seluruh rekomendasi SAKIP dalam rangka peningkatan kinerja secara keseluruhan.
8. Laporan Kinerja Kecamatan Dlanggu telah Memanfaatkan hasil evauasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas kinerja diantaranya dengan merumuskan hasil efisiensi perangkat daerah tahun lalu dalam mendukung peningkatan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang memiliki kontribusi signifikan pada sasaran strategis.

Melalui langkah-langkah tersebut, Kecamatan Dlanggu berupaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas kinerja, sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Kecamatan Dlanggu berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel demi terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, dan makmur.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

Mojokerto, Juli 2026

CAMAT DLANGGU

MASLUCHMAN, SH., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 196911191998031005

LAMPIRAN

Dokumen-dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan di Kecamatan Dlanggu pada tahun 2025, secara lengkap dapat diunduh melalui tautan: :

https://drive.google.com/drive/folders/1-ykhqyqgV-Hl01nm1PC6zLZCpbxtXQjN?usp=sharing

Adapun dokumen pendukung yang dimuat antara lain:

1. Perjanjian Kinerja APBD 2025;
2. Perjanjian Kinerja P-APBD 2025;
3. P-Renja 2025;
4. E-81 AKSARA

.